

Membangun Program Kemitraan sebagai Kebijakan untuk Menurunkan *Non-Performing Loans* UMKM di Kabupaten Buleleng

Komang Yudi Suardana

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng
Jl. Melur No.31, Kaliuntu, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali, Indonesia

e-mail korespondensi: komangyudisuardana24@gmail.com

Submit: 07-04-2025 | Revisi : 17-04-2025 | Terima : 19-04-2025 | Terbit online: 01-05-2025

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab tingginya *Non-Performing Loans* (NPL) UMKM di Kabupaten Buleleng dan alternatif kebijakan untuk mengatasinya. Dalam empat tahun terakhir, NPL UMKM di daerah ini tertinggi di Bali, berdampak pada UMKM, perbankan, dan ekonomi nasional. Observasi menunjukkan banyak UMKM sektor pertanian dan perkebunan mengalami kredit macet akibat pendapatan tidak menentu, tingginya biaya produksi, serta fluktuasi harga komoditas. Akses pemasaran yang terbatas dan rendahnya kualitas SDM memperburuk kondisi ini. Berakhirnya relaksasi restrukturisasi kredit pasca-pandemi semakin meningkatkan rasio NPL UMKM. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap lima pemilik UMKM yang mengalami kredit macet. Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi terkait kebijakan pemberdayaan UMKM yang telah dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pendapatan, keterbatasan pemasaran, dan kualitas SDM yang kurang menjadi faktor utama tingginya NPL UMKM. Solusi jangka panjang bagi Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, UKM Kabupaten Buleleng yakni membangun platform kemitraan antara UMKM dan perusahaan besar dalam rantai pasok. Kemitraan ini akan memberikan akses pasar lebih luas, stabilitas harga, serta dukungan teknologi dan keahlian, yang pada akhirnya meningkatkan kemampuan UMKM dalam membayar kredit. Rekomendasi ini dapat dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Penguatan Kemitraan UMKM dalam Rantai Pasok untuk Mengurangi NPL UMKM.

Kata Kunci: Kebijakan, NPL, Program kemitraan, UMKM

Abstract - This policy paper analyzes the causes of the high *Non-Performing Loans* (NPL) of MSMEs in Buleleng Regency and offers policy alternatives to address the issue. Over the past four years, MSME NPLs in this region have been the highest in Bali, impacting MSMEs, banking institutions, and the national economy. Observations indicate that many MSMEs in the agriculture and plantation sectors experience loan defaults due to unstable income, high production costs, and fluctuating commodity prices. Limited market access and low human resource quality further exacerbate this condition. The expiration of post-pandemic credit restructuring relaxation has also increased the MSME NPL ratio. This policy paper employs a qualitative method through interviews with five MSME owners who have experienced loan defaults. The analysis reveals that low income, restricted market access, and inadequate human resource quality are the main factors contributing to high MSME NPLs. As a long-term solution, the Buleleng Regency Office of Trade, Industry, Cooperatives, and MSMEs is advised to establish a partnership platform between MSMEs and large corporations within the supply chain. This partnership would provide broader market access, price stability, and support in technology and expertise, ultimately enhancing MSMEs' ability to repay loans. This recommendation can be formalized in a Regent Regulation on Strengthening MSME Partnerships in the Supply Chain to Reduce MSME NPLs.

Keywords: Policy, NPL, Partnership Program, MSMEs

1. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia, dengan proporsi mencapai 99% dari total unit usaha. Selain itu, UMKM menyumbang sekitar 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan berperan dalam menyerap 96,9% dari total tenaga kerja di tingkat nasional (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2022). Tingginya kontribusi UMKM juga disertai dengan berbagai tantangan. Berdasarkan *MSMEs Empowerment Report 2022*, UMKM menghadapi



sejumlah permasalahan, terutama dalam hal pemasaran produk, ketersediaan bahan baku, aspek keuangan, serta adopsi teknologi digital (Mawarsari, 2023). Studi terbaru Bank Indonesia dalam *MSMEs Empowerment Report 2022* mengungkap bahwa 69,5% UMKM belum mendapatkan akses pinjaman. Hambatan utama yang dihadapi berasal dari rendahnya tingkat inklusi keuangan di sektor UMKM. Di sisi lain, lembaga keuangan seperti bank dan multifinance juga menemui kendala dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan UMKM. Selain itu, banyak transaksi masih dilakukan secara manual tanpa pencatatan yang memadai, sehingga laporan keuangan menjadi kurang lengkap. Padahal, pembukuan yang tersusun dengan baik dapat membantu pelaku usaha dalam mengakses layanan keuangan yang lebih luas, termasuk pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Mawarsari, 2023). Kesulitan dalam memperoleh kredit menjadi tantangan bagi UMKM. Bahkan, bagi yang berhasil mendapatkan pinjaman, banyak yang menghadapi kendala dalam pengembaliannya, yang berujung pada kredit macet atau *Non-Performing Loan (NPL)*. NPL mencerminkan risiko kegagalan dalam pelunasan kredit, yang dapat menyebabkan kerugian bagi bank jika permasalahan kredit tidak segera ditangani dengan tepat (Nansi, 2019).

NPL merupakan indikator dalam menilai risiko kredit macet. Semakin tinggi angka NPL, semakin besar risiko yang harus ditanggung oleh perbankan. Tingginya NPL juga mencerminkan kegagalan bank dalam mengelola bisnisnya, yang dapat menyebabkan masalah likuiditas (kesulitan memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga), rentabilitas (utang yang tidak tertagih), dan solvabilitas (penurunan modal) (Arsy et al., 2023). Anggriawan, Branch Office Head Bank Rakyat Indonesia mengungkapkan bahwa pada tahun 2022 kredit macet di sektor UMKM mencapai 4,29% dari total kredit (Agungnoe, 2022). Secara ideal, nilai NPL harusnya rendah termasuk juga NPL UMKM, karena tingkat NPL yang tinggi dapat berdampak negatif pada UMKM (Sandria, 2024), perbankan (Wijayani, 2023), serta perekonomian Indonesia secara keseluruhan (CNBC Indonesia, 2024b).

Data Bank Indonesia (2024) menunjukkan bahwa UMKM di Kabupaten Buleleng menjadi salah satu UMKM dengan NPL di atas NPL nasional dalam tiga tahun terakhir yakni 2021 sampai 2023. Secara nasional, rasio NPL kredit pada Desember 2021 mencapai 3%, turun menjadi 2,44% pada Desember 2022, dan kembali turun ke 2,19% pada Desember 2023 (Katadata, 2024). Tahun 2021 NPL UMKM di Kabupaten Buleleng sebesar 4,14% sedangkan NPL nasional sebesar 3%. Tahun 2022 NPL UMKM di Kabupaten Buleleng sebesar 4,44% sedangkan NPL nasional sebesar 2,44%. Tahun 2023 NPL UMKM di Kabupaten Buleleng sebesar 3,19% sedangkan NPL nasional sebesar 2,19%. Rata-rata NPL UMKM di Kabupaten Buleleng yakni Triwulan I-IV 2021-2023 dan Triwulan I-II 2024 menjadi yang tertinggi di Provinsi Bali yakni sebesar 3,66%. NPL yang tinggi berdampak pada lemahnya pertumbuhan kredit di sektor UMKM (Sandria, 2024). Pertumbuhan kredit sangat penting bagi UMKM dalam mendorong perkembangan sektor ini karena kredit memberikan akses pada modal yang dibutuhkan UMKM untuk memperluas bisnis, meningkatkan produktivitas, serta memperbaiki daya saing. NPL yang tinggi juga menyebabkan pelaku UMKM kesulitan mendapatkan kredit baru karena bank akan berhati-hati dalam memberikan kredit (Hanif & Widawati, 2024). Kondisi ini juga menghambat perkembangan UMKM karena kredit menjadi salah satu sumber modal penting bagi UMKM untuk mengembangkan bisnisnya.

Hasil observasi penulis pada beberapa desa di Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa banyak UMKM sektor perkebunan atau pertanian yang mengalami kredit macet. Seperti para pengusaha di Catur Desa Adat Dalem Tamblingan yang terdiri atas Desa Gobleg, Munduk, Gesing dan Desa Umejero. Para pengusaha sektor pertanian dan perkebunan seperti cengkeh, kopi, dan durian di lokasi ini sangat banyak yang memiliki permasalahan kredit macet karena pendapatan yang tidak menentu. Kemudian penelusuran lebih mendalam menemukan bahwa permasalahan pendapatan diakibatkan karena UMKM tidak memiliki akses untuk menjual hasil panen dengan harga yang lebih stabil. Saat musim panen, produksi komoditas meningkat, menyebabkan harga turun. Namun, biaya produksi tidak dapat dikurangi dan cenderung meningkat, sehingga pengusaha kesulitan menutupi biaya produksi. Kondisi ini terus berulang setiap tahun karena petani terjebak dalam siklus yang tidak menguntungkan ini. Secara lebih mendalam, hal ini terjadi karena UMKM tidak memiliki akses terhadap mekanisme yang dapat menjaga stabilitas harga jual hasil pertanian dan perkebunan. Kualitas SDM yang masih rendah menyebabkan UMKM tidak mampu mengakses jaringan pemasaran untuk mendapatkan penawaran harga lebih konsisten. Akibatnya, mereka yang bergantung pada pinjaman atau kredit berisiko mengalami kredit macet.

Kondisi ini dapat mengancam keberlanjutan UMKM, menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, dan menambah beban risiko kredit bagi perbankan jika tidak ditangani. Lembaga keuangan menggunakan restrukturisasi kredit sebagai strategi penurunan kredit bermasalah (Sari et al., 2021). Namun strategi ini hanya untuk jangka pendek. Berakhirnya relaksasi restrukturisasi kredit terkait pandemi Covid-19 meningkatkan rasio NPL kredit UMKM (CNBC Indonesia, 2024a). Sehingga diperlukan strategi untuk mengatasi permasalahan NPL UMKM untuk jangka waktu yang lebih panjang dan berkelanjutan. Peran Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, UKM Kabupaten Buleleng sangat penting dalam membuat kebijakan secara berkelanjutan untuk menurunkan tingkat NPL UMKM di Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan penjelasan permasalahan di atas, maka yang menjadi permasalahan (*Problem Statement*) adalah kurangnya kualitas SDM menyebabkan terbatasnya akses UMKM sektor perkebunan atau pertanian terhadap pembeli yang memberikan harga lebih stabil sehingga berdampak pada pendapatan UMKM sektor perkebunan atau pertanian yang cenderung mengalami penurunan saat musim panen. Saat musim panen pendapatan cenderung menurun, namun beban produksi muncul saat itu, sehingga kondisi ini menyulitkan

keuangan UMKM yang pada akhirnya menyebabkan mereka tidak mampu melaksanakan kewajiban kredit dan bermuara pada peningkatan NPL UMKM.

NPL UMKM yang tinggi memiliki dampak bagi berbagai pihak. Bagi UMKM, NPL yang tinggi menjadi salah satu penyebab pertumbuhan kredit di sektor UMKM melambat (Sandria, 2024). NPL yang tinggi menjadi tanda banyak kredit macet dari UMKM, yang mendorong bank untuk lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pinjaman baru. Risiko gagal bayar yang tinggi mendorong bank untuk memberlakukan standar yang lebih ketat dan menaikkan suku bunga kredit, sehingga membatasi akses UMKM terhadap pembiayaan. Keadaan ini dapat menghambat perluasan sektor UMKM yang bergantung pada pinjaman untuk modal usaha. Bagi Bank, peningkatan risiko kredit yang diprosikan melalui NPL terbukti mampu menurunkan kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan (Wijayani, 2023). Peningkatan NPL menyebabkan semakin banyak kredit macet sehingga bank menanggung kerugian akibat wanprestasi tersebut. Bank harus mengalokasikan sumber daya tambahan untuk penyisihan kerugian kredit, sehingga mengurangi modal yang tersedia untuk usaha lain yang menguntungkan. Pendapatan bunga bank juga berkurang akibat dari kredit macet sehingga membatasi margin laba. Bank menghadapi kendala likuiditas yang lebih tinggi dan peningkatan biaya operasional akibat peningkatan NPL. Bagi ekonomi nasional, saat ini kredit yang disalurkan kepada UMKM berkisar antara 19–20% dari total kredit perbankan, sementara sektor UMKM berkontribusi sekitar 60% terhadap PDB. Oleh karena itu, tekanan yang dialami UMKM dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Diperlukan kebijakan yang mendukung pemulihan UMKM, termasuk regulasi terkait suku bunga, akses kredit, serta upaya membantu UMKM menghadapi tantangan pasca-pandemi Covid-19 dan proses transformasi digital (CNBC Indonesia, 2024b).

NPL menggambarkan kondisi di mana kredit yang diberikan menghadapi risiko gagal bayar, yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi bank jika masalah kredit tidak segera ditangani (Nansi, 2019). NPL digunakan sebagai indikator risiko kredit macet; semakin tinggi angka NPL, semakin besar risiko yang ditanggung oleh perbankan. Selain itu, tingginya NPL mencerminkan kegagalan bank dalam mengelola bisnis, yang dapat menimbulkan masalah likuiditas (ketidakmampuan membayar kewajiban kepada pihak ketiga), rentabilitas (hutang yang tidak tertagih), serta solvabilitas (penurunan modal) (Arsy et al., 2023).

Tingginya NPL UMKM dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup tekanan terhadap pendapatan UMKM (Sintha et al., 2023) sebagai penyebab utama, diikuti oleh aspek pemasaran, produksi, pengelolaan keuangan, pemanfaatan dana pinjaman, aspek teknis, dan manajemen (Arif, 2011 dalam Sari & Sari, 2018). Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi, serta karakteristik nasabah (Arif, 2011 dalam Sari & Sari, 2018). Berdasarkan teori penyebab kredit macet di atas dan dikonfirmasi dengan hasil wawancara bersama beberapa UMKM sektor pertanian dan perkebunan di Catur Desa Adat Dalem Tamblingan yang terdiri atas Desa Gobleg, Munduk, Gesing dan Desa Umejero diketahui penyebab tingginya NPL adalah pendapatan yang tidak menentu dan cenderung menurun saat musim panen. Permasalahan pendapatan ini kemudian diakibatkan oleh terbatasnya akses UMKM terhadap pembeli yang menetapkan harga lebih stabil (pemasaran). Keterbatasan akses ini diakibatkan oleh kualitas SDM yang masih kurang.

Terdapat beberapa alternatif kebijakan untuk mengatasi permasalahan NPL UMKM yang tinggi. NPL UMKM dipengaruhi oleh pendapatan, pemasaran, dan kualitas SDM. Ketiga aspek ini mengarah pada pemberdayaan untuk mendukung perkembangan dan kinerja UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan, pemasaran, dan kualitas SDM menjadi solusi kebijakan untuk menurunkan NPL UMKM. Temuan empiris penelitian terdahulu menunjukkan bahwa beberapa upaya dilakukan pemerintah dalam pengembangan UMKM diantaranya sebagai fasilitator dalam memberikan dukungan dan dorongan berupa sarana dan prasarana, regulator dalam upaya mendukung kebijakan UMKM, dan katalis dalam upaya menunjukkan UMKM diapresiasi dan dirangsang pertumbuhannya (Maharani & Nurlukman, 2023). Penelitian Dewi et al. (2023) menunjukkan modal, sumber daya manusia, kemitraan dan literasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM. Sehingga semua aspek ini harus diperhatikan oleh pemerintah untuk memberdayakan UMKM.

Alternatif kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan UMKM seperti pendapatan, pemasaran, dan kualitas SDM juga dapat mengikuti strategi yang diterapkan oleh negara-negara maju. Salah satu kebijakan yang diterapkan Jepang, negara dengan ekonomi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Tiongkok, telah berhasil mendorong lahirnya perusahaan-perusahaan besar dan kompetitif. Sektor UMKM mendominasi hampir seluruh bidang usaha di Jepang, mencapai 99% dari total bisnis yang ada. Bahkan, banyak perusahaan besar di Jepang memulai usahanya dari sektor UMKM. Jepang memiliki kebijakan dalam memberikan dukungan terhadap pertumbuhan dan pengembangan UMKM yang dapat meningkatkan kinerja keuangan UMKM. Jepang menerapkan berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM, termasuk bantuan internasionalisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan dalam inovasi dan pengelolaan kekayaan intelektual. Selain itu, kebijakan ini juga mencakup peningkatan daya saing UMKM, dukungan bagi pelaku ekspor, serta pengembangan UMKM yang berorientasi pada kelestarian lingkungan. Jepang juga menyediakan pelatihan dan pendampingan bagi UMKM terkait isu lingkungan, efisiensi energi, dan sistem daur ulang (Soukotta, 2024).

Selain Jepang, Tiongkok sebagai salah satu raksasa ekonomi dunia juga menerapkan beberapa fokus utama kebijakan yang mampu merangsang pertumbuhan UMKM. Tiongkok telah mengadopsi berbagai kebijakan untuk mendukung pengembangan UMKM (Windariana, 2024). Beberapa kebijakan ini termasuk pemberian kredit dan dukungan keuangan, pembentukan zona ekonomi khusus, pengurangan pajak dan biaya, peningkatan akses pasar, peningkatan keterampilan dan inovasi, pengembangan infrastruktur, dan kebijakan perlindungan hak kekayaan intelektual.

Sehingga berdasarkan kebijakan yang diterapkan oleh negara maju dalam memajukan dan meningkatkan kinerja keuangan UMKMinya, menyesuaikan dengan permasalahan aktual yang dialami oleh UMKM di Kabupaten Buleleng, dan mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, UKM Kabupaten Buleleng, seharusnya terdapat dua alternatif kebijakan baru yang bisa ditawarkan untuk menurunkan NPL UMKM di Kabupaten Buleleng. Pertama kebijakan mengatasi permasalahan pendapatan dan pemasaran. Kedua yakni kebijakan mengatasi permasalahan kualitas SDM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris penyebab tingginya NPL UMKM di Kabupaten Buleleng dan alternatif kebijakan untuk mengatasinya.

2. Metode Penelitian

Data pada *policy paper* ini dianalisis menggunakan metode kualitatif. Jenis data pada *policy paper* ini ialah data kualitatif yang berfokus pada deskripsi atau berupa data yang bersifat mendalam. Data yang diberikan oleh responden yang berupa hasil wawancara secara langsung yang nantinya akan dijelaskan kembali menggunakan kata-kata yang mudah dipahami dan dimengerti.

Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara bersama responden dan data sekunder berupa hasil penelitian terdahulu serta data kebijakan negara-negara di dunia dalam memberdayakan UMKMinya dari website berita nasional. Informan yang digunakan adalah pemilik UMKM yang mengalami kredit bermasalah di Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara bersama responden. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2020). Wawancara yang dilaksanakan dalam penelitian ini diikuti oleh lima orang pemilik UMKM yang mengalami kredit bermasalah di Kabupaten Buleleng, yang namanya tidak bersedia diungkapkan. Responden dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria UMKM sektor pertanian dan perkebunan yang mengalami permasalahan kredit macet. Instrumen wawancara dibuat untuk menggali faktor penyebab kredit macet UMKM yang dilihat dari aspek pendapatan, pemasaran, dan kualitas SDM. Pendapatan berhubungan dengan target pendapatan, perolehan pendapatan, rata-rata pendapatan, prioritas dalam mengalokasikan pendapatan, alokasi pendapatan untuk membayar pinjaman, dan alokasi pendapatan untuk memenuhi kebutuhan. Pemasaran berkaitan dengan proses mempromosikan, mendistribusikan, dan menjual produk atau jasa kepada konsumen dengan tujuan utama menciptakan nilai bagi pelanggan, membangun hubungan jangka panjang, dan meningkatkan profitabilitas bisnis. Kualitas SDM berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan, pendidikan, memahami bidangnya, kemampuan, semangat kerja dan kemampuan perencanaan pengorganisasian.

Pengabsahan data adalah teknik yang digunakan untuk menjamin bahwa semua yang telah diamati dan diteliti penulis sesuai dengan data yang sesungguhnya ada dan memang benar-benar terjadi. Hal ini dilakukan peneliti untuk memelihara dan menjamin bahwa data tersebut benar, baik bagi pembaca maupun subjek penelitian. Menurut Wijaya (2018), keabsahan data dalam penelitian kualitatif, suatu realistik itu bersifat majemuk dan dinamis, sehingga tidak ada yang konsisten dan berulang seperti semula. Keabsahan data bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih valid. Selain itu menurut Mekarisce (2020) pemeriksaan validitas memiliki empat teknik yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependensi, dan konfirmabilitas. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik keabsahan data triangulasi. Mekarisce (2020) menyatakan bahwa triangulasi adalah teknik yang berfokus pada pengembangan teori, metode, dan interpretasi data penelitian yang mana data tersebut bersumber dari responden. Secara lebih menghusus, teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan salah satu metode triangulasi dalam penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara membandingkan dan memeriksa kesesuaian informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data (Mekarisce, 2020).

Teknik analisis data adalah metode yang digunakan untuk mengolah dan menginterpretasikan data sehingga menghasilkan informasi yang valid dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang diterapkan mengacu pada model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif dilakukan melalui beberapa tahapan utama. Tahap pertama adalah pengumpulan data, yaitu proses mencari, mencatat, dan mengumpulkan informasi secara objektif sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan. Tahap kedua adalah reduksi data, yang bertujuan untuk merangkum, memilah informasi yang relevan, mengidentifikasi tema serta pola, serta menghilangkan data yang tidak diperlukan. Tahap ketiga adalah penyajian data (*data display*), yang dalam penelitian kualitatif umumnya dilakukan dalam bentuk teks atau narasi. Pada tahap ini, data yang telah direduksi disusun secara sistematis dalam laporan penelitian. Tahap terakhir adalah penarikan

kesimpulan, dimana peneliti menginterpretasikan serta memahami data yang telah diolah untuk menghasilkan temuan yang bermakna (Sugiyono, 2020).

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan NPL UMKM di Kabupaten Buleleng selama tiga tahun terakhir terus berada di atas rata-rata nasional, kemudian rata-rata NPL dalam 4 tahun terakhir (Triwulan I-IV 2021-2023 dan Triwulan I-II 2024) menempati posisi tertinggi di Provinsi Bali sesuai data pada Tabel 1.

Tabel 1. Rata-rata *Non-Performing Loan* (NPL) Kredit UMKM Provinsi Bali Triwulan I-IV 2021-2023 dan Triwulan I-II 2024

Kabupaten/Kota	Rata-rata (%)				Rata-rata 4 Tahun Terakhir (%)
	Triwulan I-IV 2021	Triwulan I-IV 2022	Triwulan I-IV 2023	Triwulan I-II 2024	
Kab. Buleleng	4,14	4,44	3,19	2,86	3,66
Kab. Klungkung	4,76	4,29	3,35	1,91	3,58
Kab. Karangasem	3,86	3,10	3,67	2,97	3,40
Kota Denpasar	3,20	3,48	2,87	2,40	2,99
Kab. Badung	3,52	4,37	1,88	1,29	2,76
Kab. Jembrana	2,09	3,28	1,23	2,41	2,25
Kab. Tabanan	1,66	1,84	1,77	1,83	1,77
Kab. Gianyar	1,21	0,95	1,28	0,82	1,07
Kab. Bangli	1,29	1,17	1,13	0,59	1,04

Sumber: Bank Indonesia (2024).

Tabel 1 menunjukkan bahwa UMKM di Kabupaten Buleleng menjadi salah satu UMKM dengan NPL diatas NPL nasional dalam tiga tahun terakhir yakni 2021 sampai 2023. Secara nasional, rasio NPL kredit pada Desember 2021 mencapai 3%, turun menjadi 2,44% pada Desember 2022, dan kembali turun ke 2,19% pada Desember 2023 (Katadata, 2024). Tahun 2021 NPL UMKM di Kabupaten Buleleng sebesar 4,14% sedangkan NPL nasional sebesar 3%. Tahun 2022 NPL UMKM di Kabupaten Buleleng sebesar 4,44% sedangkan NPL nasional sebesar 2,44%. Tahun 2023 NPL UMKM di Kabupaten Buleleng sebesar 3,19% sedangkan NPL nasional sebesar 2,19%. Rata-rata NPL UMKM di Kabupaten Buleleng yakni Triwulan I-IV 2021-2023 dan Triwulan I-II 2024 menjadi yang tertinggi di Provinsi Bali yakni sebesar 3,66%.

Hasil penelitian dalam *policy paper* ini menguraikan pilihan kebijakan yang bisa diambil untuk mengatasi permasalahan NPL UMKM di Kabupaten Buleleng. Pilihan kebijakan ini dijelaskan secara komprehensif mulai dari faktor penyebab tingginya NPL UMKM di Kabupaten Buleleng hingga solusi kebijakan yang bisa diambil. Indikator pertanyaan wawancara dan ringkasan jawaban responden disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Indikator Pertanyaan Wawancara dan Ringkasan Jawaban Responden

No.	Indikator	Ringkasan Jawaban Responden
1.	Pendapatan	Pendapatan yang tidak stabil atau menurun secara signifikan menjadi faktor utama yang menyebabkan ketidakmampuan responden dalam membayar kredit. Ketergantungan pada pendapatan usaha yang fluktuatif, lemahnya pengelolaan keuangan, serta penurunan harga hasil produksi pertanian memperparah kondisi UMKM, hingga berujung pada keterlambatan pembayaran, ketidakmampuan membayar bunga maupun pokok kredit, bahkan kebangkrutan.
2.	Pemasaran	Pemasaran sangat mempengaruhi kemampuan membayar kredit. Ketergantungan pada pembeli lokal dan pemasaran yang terbatas menyebabkan pendapatan rendah, terutama saat harga panen tidak stabil. Rendahnya pendapatan membuat mereka kesulitan menutupi biaya produksi dan membayar cicilan pinjaman, baik bunga maupun pokok. Beberapa responden bahkan harus menggunakan pinjaman bank untuk menutup biaya produksi, yang memperparah kondisi keuangan saat hasil penjualan tidak mencukupi.
3.	Kualitas SDM	Kualitas SDM sangat memengaruhi kemampuan membayar kredit. Responden menyoroti bahwa keterbatasan dalam pengetahuan, keterampilan manajerial, perencanaan bisnis, pengorganisasian usaha, serta kemampuan pemasaran dan adaptasi teknologi berdampak langsung pada penurunan pendapatan usaha, yang pada akhirnya menghambat kemampuan untuk memenuhi kewajiban kredit. Ketiadaan strategi pemasaran yang efektif dan ketergantungan pada pemasaran tradisional atau tengkulak juga memperburuk kondisi keuangan usaha mereka. Secara keseluruhan, rendahnya kualitas SDM menghambat pertumbuhan bisnis dan menurunkan kinerja keuangan

No.	Indikator	Rangkuman Jawaban Responden
4	Indikator paling berdampak pada kemampuan membayar pinjaman adalah pendapatan	pelaku UMKM, sehingga mengurangi kemampuan mereka dalam membayar pinjaman tepat.

Sumber: Hasil Wawancara (2025)

Hasil penelitian menunjukkan kredit macet yang dialami UMKM di Kabupaten Buleleng disebabkan oleh faktor utama yakni pendapatan. Pada aspek pendapatan terjadi permasalahan berupa penurunan kinerja keuangan khususnya pendapatan yang tidak stabil. Penurunan kinerja keuangan karena penurunan pendapatan merupakan penyebab utama ketidakmampuan UMKM dalam membayar kredit. Penurunan kinerja keuangan UMKM, terutama pada UMKM yang pendapatannya tidak menentu menimbulkan tantangan signifikan terhadap kapasitas mereka dalam membayar utang. Ketergantungan pada pendapatan yang tidak menentu dan diversifikasi aliran pendapatan yang tidak memadai menyebabkan UMKM sangat rentan terhadap perubahan kondisi pasar dan ekonomi. Kenaikan dan penurunan permintaan yang disebabkan oleh pengaruh musiman atau pergeseran ekonomi makro dapat mengganggu pendapatan dan arus kas. UMKM sering kali bergantung pada utang untuk mengatasi kekurangan kas untuk menghadapi kondisi ini, memperburuk beban utang mereka dan meningkatkan Pinjaman Bermasalah (NPL).

Harga jual komoditas pertanian dan perkebunan juga tidak menentu dan sering mengalami penurunan saat musim panen. Banyak pengusaha sektor pertanian dan perkebunan yang meminjam dana untuk proses produksi sampai komoditas siap dijual dengan rencana akan menutupi pinjaman menggunakan hasil penjualan. Sering terjadi permainan harga oleh pemasok lokal atau sering disebut dengan tengkulak yang membuat harga komoditas menjadi sangat rendah di masa panen, sedangkan biaya produksi sangat tinggi dan cenderung mengalami peningkatan. Kondisi ini menyebabkan UMKM di bidang pertanian dan perkebunan mengalami masalah keuangan yang pada akhirnya tidak mampu melunasi kewajibannya baik itu bunga maupun pokok pinjaman. Pendapatan yang tidak stabil menjadi penghambat kapasitas UMKM dalam memenuhi kewajibannya, yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran bahkan potensi gagal bayar. Pada akhirnya kondisi ini mengakibatkan peningkatan NPL di sektor perbankan, sehingga kepercayaan bank terhadap UMKM menjadi berkurang dan bank membatasi akses UMKM terhadap pendanaan. Kondisi yang paling parah adalah banyak UMKM yang menjadi bangkrut karena ketidakmampuan membayar kredit. Padahal UMKM-UMKM tersebut pada masa panen menyerap sangat banyak tenaga kerja.

Kemudian pendapatan juga dipengaruhi oleh aspek pemasaran. UMKM mengalami permasalahan berupa pemasaran yang masih konvensional dan terbatas kepada warga atau pengepul di sekitar (pemasaran). Kondisi ini menyebabkan UMKM tidak dapat mengakses pasar lebih luas yang memberikan harga lebih stabil. Saat ini UMKM terjebak pada pola pemasaran yang sangat buruk karena sangat mengandalkan pengepul disekitar. Harga mengalami penurunan saat panen, sedangkan saat panen muncul beban produksi yang sangat besar. Sehingga kondisi ini menyebabkan permasalahan serius pada pendapatan bersih UMKM.

Keterbatasan pada aspek SDM menyebabkan UMKM mengalami permasalahan pada aspek pemasaran. Hal ini menyebabkan UMKM memperoleh pendapatan yang tidak konsisten mengikuti penetapan harga pengepul disekitar, yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban kreditnya. Fluktuasi penjualan akibat dari akses pasar yang terbatas memberikan hambatan pada kemampuan UMKM untuk mempertahankan arus kas yang memadai. Pemasaran tradisional atau konvensional yang terbatas ini menyebabkan jangkauan UMKM juga menjadi terbatas. Likuiditas bisnis menjadi terganggu akibat dari pendapatan yang tidak memadai dan tidak stabil, sehingga hal ini menurunkan kemampuan UMKM untuk memenuhi kewajiban pinjaman kepada lembaga keuangan. Ketika tantangan dalam pembayaran kembali kredit meningkat, kemungkinan NPL meningkat yang mengakibatkan berkurangnya akses ke pembiayaan lebih lanjut dan merusak reputasi UMKM.

Keterbatasan pada aspek SDM menyebabkan UMKM tidak dapat mengorganisir atau mengelola bisnisnya dengan baik. Manajemen perusahaan yang tidak memadai menjadi salah satu penyebab UMKM tidak mampu untuk melunasi utang. Tidak adanya perencanaan bisnis membuat UMKM tidak siap menghadapi hambatan eksternal, termasuk kegagalan memenuhi kewajiban keuangan selama bisnis mengalami penurunan. UMKM juga rentan terhadap berbagai fluktuasi, baik secara ekonomi maupun di pasar akibat dari manajemen risiko yang tidak memadai. UMKM secara operasional menjadi tidak efisien dan kemampuan beradaptasi mereka terhadap perubahan menjadi terhambat akibat dari tidak adanya akses terhadap teknologi dan informasi. Lebih jauh, banyak UMKM yang terjebak dalam beban utang yang melebihi kapasitas pembayaran mereka akibat dari kurang memahami manajemen kredit dan utang. UMKM akan terus menghadapi tantangan dalam memenuhi kewajiban keuangan mereka apabila tidak ada peningkatan dalam pengelolaan bisnis dan utang. Permasalahan pada aspek SDM menyebabkan UMKM tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi menyebabkan UMKM yang tidak dapat beradaptasi menjadi tersingkir sehingga kinerjanya menurun yang berdampak pada penurunan kemampuan membayar kredit.

Kemajuan teknologi yang pesat telah mengubah lingkungan bisnis secara mendalam, khususnya bagi UMKM. UMKM kemungkinan besar akan tersingkir dalam persaingan pasar akibat dari kondisi gagal beradaptasi

dengan kemajuan teknologi, karena mereka kehilangan peluang untuk meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan kualitas produk atau layanan. Pendapatan yang tidak mencukupi menghambat kemampuan UMKM untuk mempertahankan arus kas yang sehat, pada akhirnya menyebabkan UMKM mengalami kesulitan dalam pembayaran pinjaman tepat waktu. Dalam situasi ini, adaptasi teknologi bukan sekadar keunggulan kompetitif, tetapi persyaratan penting untuk mempertahankan kelangsungan bisnis. UMKM yang menerapkan teknologi digital dalam pemasaran lebih mungkin mempertahankan kelangsungan bisnis dan mengurangi masalah keuangan yang dapat mengakibatkan kegagalan membayar kredit.

Pada aspek kualitas SDM, terdapat beberapa permasalahan terkait pengetahuan dan keterampilan, pendidikan, pemahaman terhadap bidang usaha yang dijalani, dan kemampuan pengorganisasian bisnis. Permasalahan ini menyebabkan pemilik UMKM menjadi gagal dalam pemasaran, manajemen bisnis, dan ketidakmampuan dalam mengikuti perkembangan teknologi. Kualitas SDM yang rendah pada akhirnya berdampak langsung pada kemampuan individu atau kelompok dalam mengelola usaha dan memanfaatkan peluang ekonomi, yang pada akhirnya menurunkan pendapatan. Rendahnya keterampilan dan pengetahuan menyebabkan produktivitas yang tidak optimal, inefisiensi dalam pengelolaan usaha, serta kesulitan beradaptasi dengan perubahan teknologi atau pasar. SDM yang kurang kompeten juga sering kali gagal menerapkan inovasi atau strategi bisnis yang tepat, yang penting untuk meningkatkan nilai produk dan daya saing di pasar. Kualitas SDM yang rendah menyebabkan bisnis tidak dapat menemukan jalan keluar dari permasalahan keuangan. Akibatnya, pendapatan cenderung stagnan atau menurun, karena rendahnya kualitas produk, kesalahan manajemen, serta ketidakmampuan bersaing di pasar yang lebih luas.

Penyebab UMKM tidak dapat memenuhi kewajiban kreditnya adalah adanya penurunan kinerja karena penurunan pendapatan, pemasaran, dan aspek manajemen. Berikut adalah rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif bagi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Buleleng dalam upaya menurunkan NPL UMKM, yang mengintegrasikan berbagai aspek penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan produktif. Alternatif kebijakan dianalisis terlebih dahulu menggunakan kriteria atau parameter kebijakan untuk menghasilkan solusi kebijakan. Kriteria atau parameter penilaian kebijakan menurut Bardach dalam Tumanggor & Santoso (2019) yang mencakup empat kriteria yaitu:

1. Kelayakan Teknis (*Technical Feasibility*)

Kriteria ini menilai apakah alternatif yang dipilih mampu menyelesaikan masalah utama. Terdapat dua aspek penting yaitu efektivitas dan kecukupan. Efektivitas mengacu pada sejauh mana alternatif tersebut dapat mencapai tujuan yang diharapkan, sementara kecukupan menilai seberapa besar solusi yang ditawarkan dapat mengatasi masalah yang ada.

2. Kemungkinan Ekonomi dan Finansial (*Economic and Financial Possibility*)

Aspek ini mencakup efisiensi ekonomi, profitabilitas, dan efektivitas biaya. Efisiensi ekonomi menilai apakah penggunaan sumber daya yang tersedia dapat menghasilkan manfaat optimal. Profitabilitas membandingkan input dan output kebijakan, sedangkan efektivitas biaya mempertimbangkan apakah tujuan dapat dicapai dengan pengeluaran seminimal mungkin.

3. Kelayakan Politik (*Political Viability*)

Penilaian dalam aspek ini mencakup tingkat penerimaan, kesesuaian, responsivitas, legalitas, dan keadilan. Tingkat penerimaan melihat apakah kebijakan dapat diterima oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Kesesuaian menilai apakah kebijakan sejalan dengan nilai-nilai sosial yang berlaku. Responsivitas mengukur kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan masyarakat. Legalitas memastikan kebijakan tidak bertentangan dengan regulasi yang ada, sementara aspek keadilan mempertimbangkan apakah kebijakan tersebut dapat mendorong kesetaraan sosial.

4. Kelayakan Administratif (*Administrative Operability*)

Aspek ini mencakup otoritas, komitmen institusi, kapasitas, dan dukungan organisasi. Otoritas menilai apakah lembaga pelaksana memiliki kewenangan yang cukup. Komitmen institusi mengacu pada keterlibatan administrator di berbagai tingkatan. Kapasitas berhubungan dengan kompetensi aparatur, baik dalam pemahaman konsep maupun keterampilan teknis. Dukungan organisasi merujuk pada kesiapan lembaga pelaksana dalam menjalankan kebijakan.

Hasil analisis alternatif kebijakan untuk menurunkan NPL UMKM di Kabupaten Buleleng diperoleh suatu kebijakan baru yang belum pernah diterapkan oleh DisdagperinkopUKM Kabupaten Buleleng. Kebijakan tersebut berhubungan dengan peningkatan pendapatan dan mengatasi permasalahan rendahnya kualitas SDM yang memenuhi kriteria kelayakan teknis, kemungkinan ekonomi dan finansial, kelayakan politik, dan kelayakan administratif. Kebijakan yang dipilih adalah membangun platform kemitraan antara UMKM dan perusahaan besar dalam rantai pasok (*supply chain*), memungkinkan UMKM menjadi supplier bagi perusahaan besar atau ikut serta dalam proyek-proyek strategis. Kebijakan ini memiliki dampak memperkuat daya saing UMKM dengan memberikan akses ke pasar yang lebih besar, teknologi, keahlian dari perusahaan besar, dan jaminan harga lebih stabil yang secara tidak langsung mengurangi risiko keuangan UMKM.

Rantai pasok adalah jaringan organisasi yang terlibat dalam penyediaan produk atau layanan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga produk akhir yang dikirimkan kepada konsumen. Dalam konteks UMKM dan perusahaan besar, kemitraan dalam rantai pasok melibatkan kolaborasi di berbagai tahapan produksi, distribusi, pemasaran, hingga penjualan. Platform kemitraan ini dapat berbentuk digital maupun fisik yang menghubungkan UMKM dengan perusahaan besar sebagai pemasok, distributor, atau penyedia jasa dalam satu ekosistem yang terintegrasi.

Kabupaten Buleleng memiliki banyak perkebunan atau pertanian seperti cengkeh, kopi, dan durian. Daya beli masyarakat yang terkadang menurun dan kecenderungan bahwa harga komoditas akan menurun saat musim panen khususnya saat panen raya. Saat panen raya, terkadang banyak hasil panen yang tidak terserap sehingga petani mengalami kerugian. Sedangkan biaya produksi yang cenderung mengalami peningkatan menyebabkan para pengusaha sering mengalami kesulitan keuangan yang pada akhirnya ketika pengusaha menggunakan modal dari pinjaman, maka akan timbul permasalahan kesulitan dalam memenuhi kewajiban kredit.

Salah satu solusi kebijakan baru yang bisa dilakukan oleh pemerintah khususnya Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM Buleleng adalah membangun platform kemitraan antara UMKM dan perusahaan besar dalam rantai pasok (*supply chain*), memungkinkan UMKM menjadi supplier bagi perusahaan besar atau ikut serta dalam proyek-proyek strategis. Program ini bertujuan untuk membangun kemitraan strategis antara UMKM seperti petani cengkeh, kopi, dan durian dengan perusahaan besar seperti perusahaan kopi, rokok, dan selai) dalam rantai pasok (*supply chain*). Program ini berupaya membangun kemitraan strategis antara UMKM di sektor pertanian dan perkebunan, termasuk cengkeh, kopi, dan durian, dengan perusahaan besar, seperti industri kopi, rokok, dan selai untuk mendorong rantai pasokan yang berkelanjutan dan saling menguntungkan. Tujuan utama kerjasama ini adalah untuk meningkatkan daya saing UMKM dengan memperluas akses pasar, menambah kapasitas produksi, dan menstandarisasi kualitas produk untuk memenuhi kebutuhan perusahaan besar. Program ini berupaya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui kolaborasi yang terorganisir dan jangka panjang, sementara pada saat yang sama membantu perusahaan besar dalam mengamankan bahan baku lokal yang berkualitas dengan harga yang kompetitif. Platform ini bertujuan untuk mendorong sinergi antara sektor UMKM dan perusahaan besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan ketahanan ekonomi nasional, dan mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor. Inisiatif ini bertujuan untuk mempromosikan inovasi, memfasilitasi adopsi teknologi, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian dan perkebunan, yang memungkinkan UMKM untuk berkembang menjadi entitas yang lebih kompetitif dan berkelanjutan. Platform kemitraan ini akan menjadi jembatan yang menghubungkan UMKM dengan pasar yang lebih luas, meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha pertanian, serta memaksimalkan nilai tambah dari hasil perkebunan lokal. Sehingga pada akhirnya UMKM sektor pertanian dan perkebunan dapat memperbaiki kondisi keuangannya dengan mendapatkan harga jual komoditas yang lebih stabil. Pada akhirnya dapat meningkatkan kemampuan membayar kredit.

Program kemitraan ini memiliki sistem dan alur yang akan dipaparkan secara lebih terperinci sebagai berikut.

1. Pendaftaran UMKM dan Perusahaan Besar

UMKM dan perusahaan besar melakukan pendaftaran kedalam platform kemitraan yang disediakan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng melalui aplikasi atau web. Data yang diperlukan meliputi kapasitas produksi, jenis produk, sertifikasi, dan kebutuhan pasar (dari sisi perusahaan besar).

2. Pemasangan (*Matchmaking*)

Sistem akan mencocokkan UMKM dengan perusahaan besar berdasarkan kebutuhan bahan baku dan kapasitas produksi. Sebagai contoh, petani kopi dipasangkan dengan perusahaan kopi yang membutuhkan kopi mentah berkualitas tertentu. Kemudian petani cengkeh dipasangkan dengan perusahaan rokok yang membutuhkan cengkeh berkualitas tertentu.

3. Perjanjian dan Kerjasama

Setelah cocok, UMKM dan perusahaan besar dapat membuat perjanjian kerjasama jangka panjang yang mencakup harga, kualitas, volume, dan pengiriman bahan baku. Perusahaan besar dapat menawarkan pendampingan teknis atau pelatihan untuk meningkatkan kualitas produk dari UMKM.

4. Monitoring dan Evaluasi

Dinas akan mengawasi kemajuan kerjasama melalui platform yang memungkinkan UMKM dan perusahaan besar mengisi laporan secara berkala terkait progres produksi, distribusi, serta masalah yang dihadapi.

Pelaksanaan program kemitraan ini menyebabkan Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng memerlukan beberapa hal sesuai penjelasan berikut.

1. Penyediaan Teknologi

Platform digital (web atau aplikasi) yang *user-friendly* dan dapat diakses oleh UMKM dan perusahaan besar untuk mengelola kemitraan. Teknologi memegang peranan penting dalam mendukung kelancaran program kemitraan antara UMKM dengan perusahaan besar melalui berbagai fungsi, seperti menyediakan platform digital yang menyediakan layanan mitra pemasok, komunikasi, dan pendaftaran secara otomatis. Teknologi

memungkinkan otomatisasi proses administrasi dan operasional, termasuk entri data, pengelolaan inventaris, dan distribusi produk yang meningkatkan efisiensi kerja. Teknologi juga memfasilitasi transparansi melalui pemantauan secara *real-time* untuk memastikan kepatuhan terhadap kesepakatan. Teknologi meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kerjasama tim dalam program kemitraan, yang menguntungkan semua pihak yang terlibat.

2. Regulasi dan Standar Mutu

Mengembangkan standar mutu untuk produk UMKM agar sesuai dengan persyaratan industri besar dan pasar global.

Pelaksanaan program kemitraan ini memiliki alur kerja yang dimulai dengan pendaftaran UMKM dan perusahaan besar, kemudian *matchmaking* sesuai kebutuhan, perjanjian dan penetapan standar mutu, implementasi produksi dan pengiriman, terakhir adalah monitoring dan evaluasi oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.

Pelaksanaan program kemitraan ini diharapkan memiliki dampak berupa peningkatan pendapatan dan juga stabilitas pendapatan UMKM. Dengan akses ke pasar yang lebih besar dan stabil, UMKM dapat menjual produk dengan harga yang lebih kompetitif dan dalam jumlah besar. UMKM dapat terhindar dari permainan harga tengkulak yang sangat merugikan UMKM yang awalnya UMKM bidang pertanian dan perkebunan hanya berperang dengan musim, kini harus terkena permainan harga para tengkulak yang tidak bertanggungjawab.

Platform kemitraan ini dapat menjadi solusi jangka menengah sampai panjang untuk mengoptimalkan potensi UMKM dalam sektor pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat posisi tawar mereka di pasar sehingga pendapatan menjadi stabil dan dapat memenuhi biaya produksi.

Kebijakan kemitraan ini menjadi salah satu strategi pengembangan bisnis UMKM khususnya pada peningkatan pendapatan. Dengan pendekatan yang terpadu, UMKM di Kabupaten Buleleng dapat lebih siap menghadapi tantangan ekonomi, mengurangi risiko gagal bayar, dan meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

4. Kesimpulan

Tingginya NPL UMKM di Kabupaten Buleleng disebabkan oleh rendahnya pendapatan, pemasaran, dan kualitas SDM. Berdasarkan hasil kajian dan analisis kualitatif, direkomendasikan kebijakan peningkatan pendapatan, akses pasar, dan kualitas SDM melalui pembangunan platform kemitraan antara UMKM sektor pertanian dan perkebunan dengan perusahaan besar dalam rantai pasok. Kebijakan ini diusulkan dalam bentuk Peraturan Bupati tentang Penguatan Kemitraan UMKM dalam Rantai Pasok, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, memperluas pasar, dan memperkuat kapasitas SDM guna menurunkan NPL. Peraturan ini mengatur mekanisme kemitraan, insentif bagi perusahaan mitra, pelatihan dan pendampingan UMKM, serta penguatan akses pemasaran digital. Perbup ini menjadi dasar hukum implementasi kebijakan, memberi kepastian bagi pihak yang bermitra, serta mengatur peran pemerintah, swasta, dan UMKM dalam menciptakan ekosistem bisnis yang inklusif. Pelaksanaannya meliputi tahapan: pendaftaran, pemadanan, perjanjian kerjasama, hingga monitoring dan evaluasi, dengan dukungan teknologi, regulasi, dan standar mutu dari DisdagperinkopUKM Buleleng.

Kebijakan yang diuraikan dalam *policy paper* ini mengkhusus pada sektor pertanian dan perkebunan. Sehingga pembuat *policy paper* selanjutnya disarankan untuk menetapkan sektor yang lebih beragam sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih berlaku luas.

Referensi

- Agungnoe. (2022). *UMKM Hadapi Tantangan Kegagalan produk, Risiko Kredit dan Persaingan*. <https://ugm.ac.id/id/berita/umkm-hadapi-tantangan-kegagalan-produk-risiko-kredit-dan-persaingan>
- Arsy, S. W., Cahyaningtyas, S. R., & Waskito, I. (2023). Dampak Kebijakan Restrukturisasi Kredit Terhadap Non Performing Loan (NPL) Pada Perbankan Di Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(2), 46–55. <https://doi.org/10.29303/risma.v3i2.616>
- Bank Indonesia. (2024). *Laporan Perekonomian Provinsi Bali Agustus 2024*.
- CNBC Indonesia. (2024a). *Bos OJK Optimis NPL Kredit UMKM Aman*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240812135816-17-562351/bos-ijk-optimis-npl-kredit-umkm-aman>
- CNBC Indonesia. (2024b). *Kredit Macet UMKM Masih Tinggi, Ini Sebab & Efeknya Bagi Ekonomi RI!* <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240610100338-19-545166/kredit-macet-umkm-masih-tinggi-ini-sebab-efeknya-bagi-ekonomi-ri>
- Dewi, A. K. S., Supartini, & Syahriar. (2023). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan UMKM (Studi Kasus Pada Pelaku UMKM di Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen). *Jurnal Akuntansi Tunas Pembangunan*, 1(1), 1–11.
- Hanif, M. S., & Widawati, A. S. (2024). Analisis Determinan Kredit Macet Pada UMKM di Indonesia. *Jurnal Riset Entrepreneurship*. *Jurnal Riset Entrepreneurship*, 7(1), 31–45.
- Katadata. (2024). *Kredit Macet Turun Akhir 2023, Lebih Baik dari Pra-Pandemi*.

- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/04/02/kredit-macet-turun-akhir-2023-lebih-baik-dari-pra-pandemi>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2022). *Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah*.
- Maharani, A., & Nurlukman, A. D. (2023). Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Umkm Melalui Sosial Media Dan E-Commerce Di Kota Tangerang. *Sebatik*, 27(1), 333–343.
- Mawarsari, M. A. (2023). *Tren Digitalisasi UMKM di Indonesia 2023: Tantangan dan Peluang*.
- Mekarisce, A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12, 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Nansi, M. R. (2019). Analisis Penyebab Dan Strategi Penanganan Non Performing Loan (NPL) Perbankan Indonesia 2016. *Optimal*, 16(1), 95–120.
- Sandria, F. (2024). *OJK Ungkap Biang Kerok Kredit Macet UMKM Masih Tinggi*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240609104922-17-545005/ojk-ungkap-biang-kerok-kredit-macet-umkm-masih-tinggi>
- Sari, D. H., Khairiyah, N. M., & Ismawanto, T. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Sebagai Strategi Penurunan Kredit Bermasalah Selama Pandemic Covid-19 Pegadaian Kanwil Balikpapan. *Jurnal Studi Manajemen Dan Bisnis*, 8(2), 82–88.
- Sari, P. B., & Sari, T. J. (2018). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Loan (Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Binjai). *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(1), 56–67.
- Sintha, L., Tobing, F., Siregar, E., & Juniasti, R. (2023). Solusi Penanganan Kredit Bermasalah Dampak Pandemi Covid 19 Pada Perbankan. *Jurnal Ekobis: Ekonomi, Bisnis & Manajemen*, 13(1), 15–24.
- Soukotta, Z. A. (2024). *Intip Cara Jepang Kembangkan UMKM, Didukung Penuh oleh Pemerintah*. <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/intip-cara-jepang-kembangkan-umkm-didukung-penuh-oleh-pemerintah>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Tumanggor, P. I. J., & Santoso, R. S. (2019). Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Tegal. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(4), 1–26.
- Wijaya, H. (2018). *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. Theologia Jaffray.
- Wijayani, D. I. L. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank: Studi pada Perbankan Swasta di Indonesia. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(1), 564–575.
- Windariana, R. (2024). *Melirik Kebijakan Tiongkok Kembangkan UMKM Hingga Menjadi Raksasa Ekonomi Dunia*.